

OLD WINE IN THE NEW BOTTLE

**REVITALISASI KARANG TARUNA
DAN PRAMUKA UNTUK MENANGKAL
EKSTREMISME-KEKERASAN**

**Policy Development for Revitalizing Karang Taruna and Pramuka
PIEC - PPIM UIN Jakarta - UNDP Indonesia**

CONVEY REPORT

OLD WINE IN THE NEW BOTTLE: Revitalisasi Karang Taruna dan Pramuka Untuk Menangkal Ekstremisme-Kekerasan

Vol. 1 / No. 7/ Tahun 2018

Penanggung Jawab:

PPIM UIN Jakarta; PIEC Universitas Paramadina; UNDP Indonesia

Penulis: Suratno

Tim Peneliti: Achmad Fadil, Wandu, Lilis Hapsari, Adinda Firsty Putri, Zainul Maarif, Fuad Mahbub Stradj, Tia Rahmania, Sahrul Mauludi, Tri Wahyuti

Editor: Nadzif Subkhi

Layouter: Indra Kusuma

Penerbit:

PI EC Universitas Paramadina

Jln Gatot Subroto Kav 96-97 Mampang12790 Jakarta

Telepon/Fax: 021-79181188/021-7993375

Email : piec@paramadina.ac.id

Website : www.paramadina.ac.id

DAFTAR ISI

Acknowledgement.....	i
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan Eksekutif.....	iv
1. Latar Belakang.....	1
2. Metodologi.....	5
3. Temuan dan Analisis.....	9
4. Kesimpulan.....	35
Daftar Pustaka.....	38
Profil Penulis.....	40
Profil Lembaga.....	41

Ringkasan Eksekutif

Karang Taruna dan Pramuka memiliki sejarah dan pengalaman panjang di Indonesia terkait aktivitas kepemudaan dan kontribusinya pada penyelesaian masalah sosial. Sempat berjaya di era Orde Baru (1966-1998), namun baik Karang Taruna maupun Pramuka berangsur-angsur berkurang eksistensinya di masyarakat dan di sekolah setelah tumbang rezim Soeharto pada 1998. Melemahnya aktivitas yang sangat bermanfaat bagi kemandirian dan sosialitas generasi muda itu sangat disayangkan. Oleh karena itu, aktivitas Karang Taruna dan Pramuka beserta ajaran-ajarannya harus diaktifkan lagi. PIEC bekerjasama dengan PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia berupaya untuk mengeksplorasi apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Karang Taruna dan Pramuka. Melalui program CONVEY (*Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia*), dilakukan asesmen, survei, FGD dan simulasi upaya untuk merevitalisasi Karang Taruna dan Pramuka, sembari mendorong kedua organisasi itu untuk aktif dalam menangkal ekstremisme kekerasan yang semakin muncul di kalangan generasi muda.

Melalui asesmen dan FGD ditemukan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya eksistensi Karang Taruna di masyarakat yakni minimnya dukungan kepala desa dan lurah, kurangnya kegiatan yang produktif, banyak alternatif lain, pembinaan kurang berkelanjutan dan lemahnya koordinasi instansi terkait. Meski demikian Karang Taruna memiliki modal untuk revitalisasi yakni masih kentalnya gotong royong, minim kriminalitas dan adanya dukungan pemerintah. Sementara itu faktor yang menyebabkan berkurangnya eksistensi Pramuka di sekolah yakni bukan prioritas sekolah, pengaruh kurikulum 2013 yang membuat siswa kelelahan, pengaruh teknologi internet, kesan terhadap Pramuka yang kurang kekinian dan semi-militer, minimnya jumlah pembina pramuka dan lemahnya koordinasi dari instansi terkait. Modal Pramuka untuk revitalisasi demi menangkal ekstremisme kekerasan antara lain; masih kentalnya nilai nasionalisme, anggotanya yang besar dan tersebar di berbagai

wilayah di Indoensia, serta dukungan dari pemerintah.

Sementara itu untuk menangkal ekstrimisme kekerasan, berdasarkan simulasi (melalui perkemahan dan pelatihan) dan survei daya tahan terhadap ekstrimisme, baik Karang Taruna dan Pramuka harus ditingkatkan pengetahuan mengenai agama terutama nilai-nilai toleransi. Agar lebih cinta tanah air, Karang Taruna harus ditanamkan perasaan bangga sebagai Warga Negara Indonesia terutama melalui perbaikan kesejahteraan mereka. Sementara untuk Pramuka harus didorong untuk makin berkontribusi dalam pembangunan bangsa terutama melalui pemberian kesempatan pada mereka untuk maju, berkembang dan mengaktualisasikan potensinya baik di sekolah maupun di masyarakat.

1. Latar Belakang: Siapa Bilang Karang Taruna & Pramuka Steril dari Ideologi Ekstremisme-Kekerasan?

Awal tahun 2009, Dani Dwi Permana adalah pemuda kampung yang lugu dan baik hati di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Di usianya yang menginjak 18 tahun dan duduk di kelas 3 SMA, Dani dikenal sebagai remaja gaul yang hobi bermain basket. Dani juga tercatat sebagai pengurus Karang Taruna di desanya. Hampir semua orang menyukai Dani. Selain santun kepada semua orang, Dani juga taat beribadah. Namun semua berubah ketika Zulkifli Aroni, ayah Dani dipenjara. Zulkifli harus menjalani hukuman penjara selama 1,8 bulan karena terlibat pencurian di Kantor Perumahan Telaga Kahuripan tempat dia bekerja sebagai petugas satuan-pengamanan (Satpam).

Dani merupakan anak kedua dari Zulkifli. Selama ayahnya dipenjara, Dani tinggal bersama kakaknya, Jaka, di rumah kontrakan ayahnya. Namun karena Jaka bekerja di Jakarta, ia jarang pulang ke Bogor dan Dani sehari-hari lebih banyak sendiri di kontrakan itu. Zulkifli telah bercerai dengan istrinya beberapa tahun sebelumnya. Setelah bercerai ibu Dani pergi dan sekarang tinggal di Kalimantan bersama tiga adiknya dari suaminya yang baru. Menurut Kepala Satpam Perumahan Telaga Kahuripan, Wakidjul, hidup Dani menjadi tidak karuan sejak orang tuanya bercerai. Semenjak ayahnya dipenjara, kondisinya menjadi semakin tidak karuan. Wakidjul menuturkan, rumah kontrakan yang ditempati Dani sebenarnya milik perusahaan pemilik Kompleks Telaga Kahuripan. Zulkifli tidak memiliki rumah sehingga ada kebijakan perusahaan untuk menyewakan rumah tipe 36 berwarna kuning itu kepada Zulkifli. Biaya sewanya pun lumayan murah, hanya 60 ribu per bulannya. Rumah yang dipagari bambu itu juga meteran listriknya sudah dicabut, sepertinya karena tidak sanggup membayar. Karena rumahnya gelap, menurut Wakidjul, Dani lalu sering belajar di Masjid Assurur di Kompleks Telaga Kahuripan.



Dani Dwi Permana

Mantan Pengurus Karang Taruna, Pelaku Bom JW Marriot 2009
(Sumber: www.wikipedia.org, diakses 20 Februari 2018)

Sejak sering rajin belajar di masjid itu, pihak kompleks meminta Dani menjadi marbot (pengurus masjid). Selain belajar, Dani rajin membersihkan masjid dan sering adzan sehingga salah seorang jemaah masjid menjadi simpati dan kemudian membiayai sekolah Dani di SMA Yadika 7 Kemang Kabupaten Bogor. Dani lulus bulan Mei tahun 2009, akan tetapi sampai ia lulus ijazahnya belum juga diambil, diduga karena masih ada tunggakan biaya sekolah. Sejak awal bulan Juni, Dani tiba-tiba menghilang bersama ustadz yang sebelumnya beberapa kali mengisi pengajian di Masjid Assurur. Aktivitasnya sebagai marbot masjid inilah yang diduga menjadi media Dani untuk berkenalan dengan ustadz Saifuddin Zuhri, seorang perekrut Jamaah I slamiyah (JI). Dalam pengaruh ideologi ekstremisme-kekerasan dan doktrinasi yang intens termasuk *bai'at*, Dani akhirnya nekat menjadi pengebom bunuh diri dalam tragedi Bom Hotel JW Marriot 2 pada 17 Juli 2009.¹

Pada Agustus 2009, penulis sempat mendatangi Masjid Assurur tempat Dani banyak beraktivitas sepulang sekolah. Jaraknya sekitar 400 m dari kontrakan yang ditempati Dani. Saat itu, di masjid ada beberapa foto Dani yang sedang mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Karang Taruna setempat. Dari beberapa orang yang ditemui oleh penulis di masjid, banyak yang tidak

¹ Lihat "Dani Dwi Permana Menghilang Sejak Awal Juni" dalam www.metro.tempo.co, 8 Agustus 2009

menyangka dan menyesali mengapa Dani yang lugu dan baik hati bisa terlibat dalam jaringan teroris Jamaah Islamiyah dan melakukan pengeboman bunuh diri. Beberapa bulan sebelum kejadian bom bunuh diri itu, menurut beberapa warga Dani memang sering mengeluh karena orang tuanya bercerai dan apalagi bapaknya terlibat kasus pencurian sehingga harus dipenjara. Dani mengeluh hidupnya hancur dan merasa gagal serta sempat terlontar ingin berbuat sesuatu agar hidupnya menjadi lebih baik. Ternyata, tidak diduga dan tidak dinyana, kehidupan yang lebih ditempuh Dani adalah dengan menjadi teroris bom bunuh diri.

Sepenggal cerita Dani di atas adalah bukti tak terbantahkan bahwa; betapa ada mantan pengurus Karang Taruna lalu dalam waktu yang tidak terlalu lama justru terlibat dalam organisasi teroris Jamaah Islamiyah yang lekat dengan ideologi ekstremisme-kekerasan. Bahkan sang mantan pengurus Karang Taruna itu juga nekat melakukan pengeboman bunuh diri. Bagaimana dengan Pramuka? Setali tiga uang dengan Karang Taruna, Pramuka juga tidak sepenuhnya kebal dari ideologi ekstremisme-kekerasan, meskipun dalam bentuk yang berbeda.



Gambar Video Pengibaran Bendera Al Liwa Ar Rayah
(Sumber: www.dutaislam.com, diakses 9 Februari 2018)

Beberapa waktu yang lalu dilansir dalam situs berita www.dutaislam.com menunjukkan sebuah rekaman video siswa

sekolah dasar yang diduga bertempat di SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) Bunayya Pekanbaru Riau. Dalam video tersebut, siswa yang mengenakan seragam Pramuka diajari mengibarkan bendera *Al Liwa Ar Rayah*. Bendera yang melambangkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) itu dibentangkan dan dikibar-kibarkan oleh salah seorang siswa. Di samping siswa itu nampak seorang guru mendampinginya. Sementara para siswa lain yang duduk di halaman menyanyikan lagu yang bernafaskan jihad dengan penuh semangat. Video tersebut diunggah salah satunya oleh seorang bernama Dicky di akun Twiternya @DhikkiE dengan komentar membanggakan video tersebut².



Tangkapan Layar Twitter Pengunggah Video Al-Liwa Al-Rayah
(Sumber: www.dutaislam.com, diakses 9 Februari 2018)

Melalui terbitnya UU Ormas No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, HTI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Salah satunya, karena HTI menentang dasar negara Pancasila dan keberadaannya dianggap mengancam instabilitas NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Berita ini seolah mengonfirmasi kekhawatiran banyak pihak bahwa ideologi ekstremisme-kekerasan sudah menyusup ke lembaga pendidikan bahkan setingkat SD. Maka bisa disimpulkan bahwa salah satu target kelompok ekstremisme-kekerasan adalah anak-anak. Ini mudah dipahami karena anak-anak masih lugu dan pengetahuannya juga terbatas

² Lihat "Duh Siswa SDIT Pekanbaru Diajari Kibarkan Bendera HTI Sambil Nyanyi-Nyanyi" dalam www.dutaislam.com, Kamis 8 Februari 2018

sehingga akan lebih mudah untuk dijejali dengan ideologi seperti ekstremisme-kekerasan.

Yang lebih memprihatinkan lagi dari video di atas adalah bahwa para siswa mengenakan seragam Pramuka sehingga besar kemungkinan kegiatan dalam video di atas dilakukan saat pendidikan kepramukaan di sekolah tersebut. Ini tentu sangat ironis karena inti dari nilai-nilai dan aktivitas Pramuka adalah penanaman nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air, sementara video di atas mempertontonkan hal-hal yang sebaliknya.

2. Metodologi

Kajian ini mencoba melacak mengapa Pramuka dan Karang Taruna tidak steril dari ideologi ekstremisme kekerasan. Kajian ini akan melihat pada daya tahan kedua organisasi itu dari ideologi yang bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai dasar Pramuka dan Karang Taruna. Lebih dari itu, tulisan ini mencoba menggali lebih jauh lagi bagaimana merevitalisasi Pramuka dan Karang Taruna dengan melihat hambatan-hambatan yang ada dan peluang-peluang yang dimiliki untuk perbaikan. Di bagian akhir kajian akan diberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk pihak-pihak yang terkait untuk menunjang upaya revitalisasi kedua organisasi ini secara lebih efektif dan strategis. Secara umum, sebagian isi kajian ini didasarkan pada hasil riset dan FGD (*Focus Group Discussion*) "Asesmen terhadap Kondisi Terkini Pramuka dan Karang Taruna" dan survei "Daya Tahan Pramuka dan Karang Taruna terhadap Ekstremisme Kekerasan" serta simulasi (melalui perkemahan Pramuka dan pelatihan Karang Taruna) yang dilakukan oleh PIEC bekerja sama dengan PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia pada periode November 2017 sampai Desember 2018.

2.1 Riset Asesmen

Riset ini dilakukan untuk melihat dan menganalisis situasi terkini Pramuka dan Karang Taruna. Situasi terkini diukur melalui persepsi anggota, pengurus dan pembina Pramuka dan Karang Taruna terkait 2 topik utama yakni; hambatan-hambatan yang mereka

alami dan peluang-peluang yang mereka miliki untuk revitalisasi. Desain riset yang digunakan adalah *cross-sectional study*, di mana pengambilan data riset dilakukan dalam satu kali secara bersamaan pada obyek yang berbeda yakni Pramuka dan Karang Taruna. Pemilihan tempat dilakukan secara *purposive* di Jawa Barat (Bogor dan Sukabumi) dan Banten (Serang dan Pandeglang). Kategori tempat dibedakan antara desa dan kota dengan alasan ada perbedaan signifikan pada Pramuka dan Karang Taruna menyangkut profil anggota-anggotanya (latar belakang ekonomi dll) dan aktivitas organisasinya (bentuk, intensitas dll). Sementara penjaringan responden riset dilakukan dengan teknik *random sampling*. Lama penelitian dilaksanakan selama satu bulan pada Oktober 2017.³ Responden riset asesmen secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Responden Riset Asesmen Pramuka

Area	Bogor, Sukabumi, Serang, Pandeglang
Responden	6 sekolah di masing-masing area dengan komposisi: Sekolah (SMA, MA, SMK Negeri Sw asta), Gender (laki-laki & perempuan), Kota-Desa (kota/ibukota, kabupaten/ kotamadya, Desa/jarak >25 km dari ibukota)
Jumlah	Masing-masing sekolah 4 responden (3 siswa, 1 kepala sekolah/pembina), sehingga total responden 4 x (6 sekolah x 4 area) = 96 responden

Tabel 2. Responden Riset Asesmen Karang Taruna

Area	Bogor, Sukabumi, Serang, Pandeglang
Responden	2 Karang Taruna di masing-masing area dengan komposisi Keaktifan Karang Taruna (aktif & kurang aktif), Gender (laki-laki & perempuan), Kota-Desa (kota/ibukota, desa/>25 km dari ibu kota)
Jumlah	Masing-masing Karang Taruna 3 responden (2 pemuda, 1 kepala desa/pembina), sehingga total responden 3 x (2 Karang Taruna x 4 area) = 24 responden

³Panduan riset asesmen terlampir

2.2 FGD Karang Taruna dan Pramuka

FGD (*Focus Group Discussion*) bertujuan untuk menggali informasi, masukan, saran, dan kritik serta ide-ide kreatif dan inovatif dalam rangka merevitalisasi Pramuka dan Karang Taruna agar lebih diminati oleh kaum muda dan bagaimana strategi agar Pramuka dan Karang Taruna dapat lebih berkontribusi pada masalah-masalah sosial, terutama terkait ideologi ekstremisme kekerasan dan masalah sosial kepemudaan lainnya. FGD melihat situasi terkini Pramuka dan Karang Taruna terkait hambatan dan peluang untuk melakukan revitalisasi dari 2 perspektif yakni makro dan mikro.

Pertama, perspektif makro melihat dan mengaitkan rendahnya minat pemuda bergabung ke Pramuka dan Karang Taruna serta minimnya kontribusi Pramuka dan Karang Taruna dengan hal-hal makro seperti payung hukum dan aspek legal-formal eksistensi Pramuka dan Karang Taruna (peraturan-peraturan), kementerian atau departemen tempat Pramuka dan Karang Taruna bernaung, kebijakan dan alokasi anggaran terkait Pramuka dan Karang Taruna, koordinasi pusat (kementerian), daerah (dinas) dan lokal (sekolah/desa/kelurahan) dan hal-hal makro lainnya. **Kedua**, perspektif mikro melihat dan mengaitkannya dengan hal-hal mikro seperti; aktivitas yang sekarang ada di Pramuka dan Karang Taruna, motivasi anak/pemuda masuk Pramuka dan Karang Taruna, dukungan sekolah dan desa/kelurahan, dukungan orang tua dan masyarakat, hambatan-hambatan psikologis, sosiologis dan ekonomis yang menyebabkan rendahnya minat pemuda bergabung ke Pramuka dan Karang Taruna serta hal-hal mikro lainnya.⁴ Peserta FGD Pramuka dan Karang Taruna secara singkat adalah sebagai berikut;

Peserta FGD

Pramuka	15 orang (Kemenpora, Kemendikbud, Kwarnas/Kwarda, sekolah, anggota Pramuka, orang tua, pakar/aktivis kepanduan)
Karang Taruna	15 orang (Kemensos, Kemendes, forum Karang Taruna, kepala desa, anggota Karang Taruna, masyarakat, pakar/aktivis kepemudaan/kewirausahaan)

⁴Panduan FGD terlampir

2.3 Survei Daya Tahan Terhadap Ekstremisme Kekerasan

Survei daya tahan terhadap ekstremisme kekerasan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan alat penggalian informasi dengan responden Karang Taruna dan Pramuka. Daftar pertanyaan dalam kuesioner dibagi menjadi 2 yakni tentang toleransi agama dan tentang cinta tanah air. Kuesioner toleransi agama berjumlah 20 pertanyaan yang disusun menggunakan instrumen *Multidimensional Measure of Religiosity* (Glock & Stark, 1968) dengan 5 dimensi keagamaan yakni; keimanan, ilmu pengetahuan, pengalaman, ritual dan konsekuensi sosial. Kuesioner ini menggunakan skala likert 0=tidak pernah, 1=kadang-kadang, 2=Sering dan 4=selalu dengan *cronbach alpha* 0,935 (baik). Kuesioner cinta tanah air berjumlah 20 pertanyaan yang disusun menggunakan instrumen *Nationalism* (Stanley Benn, 1968) dengan 5 dimensi cinta tanah-air yakni; kebanggaan, ketaatan, kesatuan, kontribusi dan rela berkorban. Kuesioner ini menggunakan skala likert 0=tidak pernah, 1=kadang-kadang, 2=Sering dan 4=selalu dengan *cronbach alpha* 0,935 (baik).⁵ Responden survei daya tahan terhadap ekstremisme kekerasan secara singkat adalah sebagai berikut;

Responden Survei

Pramuka	150 peserta perkemahan Pramuka di Bogor dan Pandeglang
Karang Taruna	70 peserta pelatihan Karang Taruna di Sukabumi dan Serang

⁵ Lembar Kuesioner terlampir

3. Temuan Dan Analisis

3.1 “Anak Emas” Orde Baru: Pramuka & Karang Taruna *Jaman Old*

3.1.1 Pramuka Jaman Old

Sebelum menjelaskan bagaimana Pramuka menjadi salah satu anak-emas di era Orde Baru (1966-1998), terlebih dahulu akan dijelaskan sejarah gerakan Pramuka dunia. Hal ini karena Pramuka memiliki sejarah yang panjang, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Selain itu gerakan Pramuka yang ada di Indonesia juga merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah gerakan Pramuka dunia.

Sejarah Gerakan Pramuka (dunia) dimulai oleh Lord Robert Stephenson Smyth Baden Powell of Gilwell ketika ia memperkenalkan Gerakan Kepanduan. Baden Powell merupakan tentara Inggris yang lahir di London pada 22 Februari 1857. Pada 1908 Baden Powell melancarkan gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk anak-anak Inggris, dengan tujuan agar menjadikan anak-anak yang siaga dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan Inggris Raya pada saat itu. Gerakan Kepanduan yang didirikan oleh Baden Powell dianggap menarik dan sukses sehingga kemudian diikuti oleh negara-negara lain dengan mendirikan organisasi kepanduan. Saat ini organisasi kepanduan telah berkembang di lebih dari 140 negara.

Sejarah organisasi kepanduan di Indonesia dimulai ketika Pemerintah Kolonial Belanda membawa gagasan Boden Powell tersebut ke Indonesia. Pada 1912, muncul organisasi kepramukaan yang dianggap sebagai cabang NPO/*Nederlandsche Padvinders Organisatie* (Organisasi Kepramukaan Hindia Belanda) milik pemerintah Belanda. Organisasi NPO ini dapat bertahan sampai saat pecah Perang Dunia I serta telah memiliki Kwartir Nasional sendiri di Indonesia. Pada 1916 organisasi NPO kemudian berganti nama menjadi NIPV/*Netherland Indische Padvinders Vereeniging* atau

Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda.⁶ Pada tahun yang sama, S.P. Mangkunegara VII merencanakan membuat organisasi kepramukaan sendiri yang kemudian diberi nama JPO/*Javaansche Padvindere Organisatie*. Organisasi JPO merupakan organisasi kepanduan pertama di tanah air yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia sendiri.



Timeline Sejarah Pramuka Indonesia
(Sumber: www.tirtoid, diakses 18 Februari 2018)

Gerakan kepramukaan di Indonesia merupakan wadah pembinaan generasi muda untuk menyiapkan kader pemuda bangsa dalam

⁶ Andri Bob Sunardi, 2001, *Boyman, Ragam Latih Pramuka*, Bandung: Penerbit Nuansa Muda, hal. 3.

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi kepanduan yang berdiri sejak 1916 juga menyulut api pergerakan nasional karena organisasi itu selaras dengan semangat kesatuan nasional. Hal ini tercermin dari adanya perubahan nama dan munculnya beberapa organisasi kepanduan lokal.⁷ Beberapa organisasi kepanduan lokal yang muncul tersebut seperti organisasi kepramukaan milik Muhammadiyah yang diberi nama *Padvinder Muhammadiyah*. Akan tetapi pada 1920 organisasi itu mengganti nama mereka menjadi *Hizbul Wathan*. Selain Muhammadiyah, ada juga *Nationale Padvinderij* yang didirikan oleh Budi Utomo. Syarikat Islam juga mendirikan organisasi serupa yang diberi nama *Syarikat Islam Afdeling Padvinderij*. Nama itu kemudian diubah menjadi *SIAP/Syarikat Islam Afdeling Pandu*. Selanjutnya, menyusul berdirinya organisasi dengan nama *NATI PIJ/Nationale Islamietische Padvinderij* yang berdiri berkat *JIB/Jong Islamieten Bond*.⁸



Aktivitas Berkemah Pramuka Tahun 1950-an
(Sumber; www.pramukaria.blogspot.co.id, diakses 20 Februari 2018)

Gerakan kepramukaan pada saat itu dipandang sebagai wadah pendidikan anak-anak dan pemuda Indonesia dengan caranya sendiri yakni cara kepramukaan. Cara ini dianggap dapat mempertinggi budi pekerti serta menambah kepandaian dan keterampilan yang sangat berguna bagi pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia. Di situlah terletak perbedaan prinsip antara

⁷ Team DAP, *Buku Pintar Pramuka, Sejarah Pramuka Indonesia*, Jakarta: Penerbit DAP, hal. 22.

⁸ Idem. hal. 22-23.

kepramukaan nasional dan kepramukaan bangsa Eropa di Indonesia. Hampir semua perkumpulan kepramukaan di Indonesia pada waktu itu adalah sebagai cabang organisasi politik atau kemasyarakatan. Gerakan kepramukaan nasional tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan keadaan masyarakat Indonesia. Sumpah pemuda yang dicetuskan dalam Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 telah menumbuhkan semangat gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk bergerak lebih maju.⁹ K.H. Agus Salim kemudian mengganti istilah *Padvinder* dan *Padvindery* dengan istilah Pandu dan Kepanduan sebagai gambaran sikap dan tindakan nasionalistik. Hal ini juga disebabkan karena munculnya larangan menggunakan istilah tersebut di luar organisasi kepanduan NIPV oleh Pemerintah Hindia Belanda.¹⁰

Pada 1930 berdiri gerakan-gerakan kepanduan yang diberi nama INPO/*Indonesia Padvinder Organizatie*), PK/Pandu Kesultanan dan PPS/Pandu Pemuda Sumatera. Ketiga organisasi ini bergabung menjadi satu organisasi yaitu KBI/Kepanduan Bangsa Indonesia. Penggabungan itu didasarkan atas niat untuk mempererat persatuan antara organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Pada 1931 terbentuklah suatu federasi yang dinamakan PAPI/Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia. Pada 1938 PAPI kemudian berubah lagi menjadi BPPKI/Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI).¹¹ Kondisinya kemudian menjadi berbeda pada masa pendudukan Jepang karena seluruh organisasi kepanduan di Indonesia dilarang keberadaannya. Pada masa itu, tokoh kepanduan beralih ke organisasi yang bersifat perlawanan seperti *Seinendan*, *Keibondan* dan PETA. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, didirikan organisasi kepanduan berbentuk kesatuan. Pada 28 Desember 1945 terbentuklah PRI/Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ada di Indonesia.¹² Organisasi kepanduan seperti HW/Hisbul Wathon, SIAP/Sarekat Islam Angkatan

⁹ Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Buku Pedoman Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar*, hal. 31.

¹⁰ Setyawan, 2009, *Dari Gerakan Kepanduan ke Gerakan Pramuka*, Jakarta: Pustaka Tunasmedia, cet ke-1, hal. 2.

¹¹ Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Bahan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar*, hal. 32.

¹² Setyawan, 2009, *op.cit*, hal. 3-4.

Pandu, PII/Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katholik, KBI dan lain-lainnya kemudian berdiri kembali setelah Indonesia merdeka.¹³

Menjelang tahun 1961 organisasi kepanduan Indonesia telah terpecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan. Meski demikian, secara umum organisasi itu terhimpun dalam 3 federasi organisasi kepanduan, yaitu 1 federasi kepanduan putra yaitu IPINDO/Ikatan Pandu Indonesia, dan 2 federasi kepanduan putri yakni POPPI NDO/Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia dan PKPI/Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia.¹⁴ Kondisi tersebut membuat semakin melemahnya gerakan kepanduan Indonesia. Selain itu juga disebabkan karena pendidikan yang diselenggarakan oleh gerakan kepanduan Indonesia belum disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia pada saat itu. Implikasi dari kondisi tersebut menyebabkan gerakan kepanduan kurang memperoleh tanggapan dari masyarakat Indonesia. Akibatnya situasi yang demikian dimanfaatkan oleh PKI/Partai Komunis Indonesia untuk menjadikan gerakan kepanduan di Indonesia menjadi gerakan Pionir Muda Komunis.¹⁵

Usaha PKI seperti di atas tidak berhasil karena adanya amanat dari Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia pada 6 Maret 1961, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia tanggal 20 Mei 1961 Nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menyatakan bahwa gerakan Pramuka sebagai satu-satunya badan di wilayah Republik Indonesia yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya dengan gerakan Pramuka dilarang keberadaannya.¹⁶ Lambang Gerakan Pramuka berupa tunas kelapa juga disahkan melalui Keppres RI No. 448 Tahun 1961. Gerakan Pramuka pada akhirnya bisa diterima oleh masyarakat dan berkembang di setiap lembaga-lembaga pendidikan negeri dan swasta, baik sekolah umum atau agama dan dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat perguruan tinggi.

¹³ Idem. hal 4.

¹⁴ Idem, hal. 7.

¹⁵ Idem, hal. 8.

¹⁶ Idem, hal. 9.

Pada 12-20 Oktober 1970 diadakan Musyawarah Majelis Permusyawaratan Pramuka di Pandaan, Jawa Timur. Salah satu hasilnya adalah mengganti Anggaran Dasar Gerakan Pramuka sebagaimana Keppres No. 238 Tahun 1961 dengan anggaran dasar baru yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di era Orde Baru. Anggaran Dasar itu kemudian disahkan pada 22 Maret 1971 melalui Keppres No. 12 tahun 1971. Pada 1970-an bangsa Indonesia masih dilanda masalah sosial seperti urbanisasi, pengangguran dan sebagainya. Oleh karena itu, Menteri Transmigrasi dan Koperasi dan ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengeluarkan instruksi bersama tentang partisipasi Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan transmigrasi dan pembinaan gerakan koperasi. Terkait masalah *School Drop Out* (anak-anak putus sekolah), maka Gerakan Pramuka juga mengarahkan perhatiannya kepada pendidikan kejuruan sebagai bekal hidup untuk anak-anak dan para pemuda. Tahun itu juga dibentuk beberapa Saka (Satuan Karya) yakni Saka Tarunabumi (kerjasama dengan Departemen Pertanian), Saka Dirgantara (kerjasama dengan Angkatan Udara), Saka Bahari (kerjasama dengan Angkatan Laut) yang menyelenggarakan kegiatan di bidangnya masing-masing. Saka Tarunabumi misalnya, karena perluasan Gerakan Pramuka yang berkembang pesat sampai ke pelosok desa sehingga banyak para anggota Pramuka Penegak dan Pandega (SMA dan mahasiswa) menjadi instruktur di bidang pembangunan pertanian dan masyarakat desa. Aktivitas Saka Tarunabumi bahkan sempat menarik perhatian badan-badan internasional seperti FAO (Badan Pangan & Pertanian Dunia), UNICEF (Badan Anak-anak Dunia), UNSECO (Badan Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Dunia), ILO (Badan Pekerja/Buruh Dunia), dan *Boys Scout World Beureau* (Biro Pramuka Dunia).¹⁷

Pada November 1974 diadakan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka di Manado, Sulawesi Utara. Periode 1974-1978 merupakan fase konsolidasi Gerakan Pramuka dan peningkatan pendidikan kepramukaan. Yang dilakukan pada saat itu adalah menciptakan 'imej' yang baik terhadap anggota pramuka bahwa Gerakan Pramuka akan membawa anggota-anggotanya ke masa depan yang cerah dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk

¹⁷ Lihat www.pramukanet.org

dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa, ketahanan nasional, dan lainnya. Jika periode 1974-1978 sebagai fase konsolidasi, maka setelah Munas Gerakan Pramuka pada akhir Oktober 1978 di Bukittinggi, Sumatera Barat, beralih kepada fase stabilisasi, baik dalam pengelolaan organisasi dan administrasi Gerakan Pramuka maupun dalam pengelolaan kependidikan dan kegiatan kepramukaan. Begitu seterusnya sehingga pada periode selanjutnya Gerakan Pramuka dianggap sukses dan menjadi andalan pemerintah (dunia pendidikan) dalam mewujudkan visi dan misi Gerakan Pramuka. Masyarakat juga secara umum mengakui pentingnya Gerakan Pramuka bagi anak-anak mereka dalam mempersiapkan masa depan mereka yang lebih baik.¹⁸

3.1.2 Karang Taruna Jaman Old



Timeline Sejarah Karang Taruna

(Sumber: www.katarperkab.blogspot.com, diakses 18 Februari 2018)

Istilah Karang Taruna secara etimologis merupakan istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Tati Marjono yang diterima dan

¹⁸ Asep Maftuch, 2008, *Buku Pegangan Pembina Pramuka*, Cimahi: Madrasah Tsanawiyah Darussalam

disepakati oleh tokoh komunitas lokal yang ada disana. Karang merupakan tempat berseminya tanaman untuk dapat tumbuh dengan subur. Taruna adalah manusia pada masa remaja. Jadi Karang Taruna adalah suatu wadah bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkembang secara sehat sehingga menjadi generasi yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.



Pawai Karang Taruna

(Sumber: www.sejarahri.com, diakses 20 Februari 2018)

Sejarah Karang Taruna bermula dari pendiriannya pada 26 September 1960 di daerah Kampung Melayu Besar, Bukit Duri, Kampung Melayu, Jakarta Timur melalui proyek eksperimental Karang Taruna kerjasama masyarakat Kampung Melayu yakni YPAY (Yayasan Perawatan Anak yatim) dengan Jawatan Pekerjaan Sosial, Departemen Sosial. Sebelum berdiri Karang Taruna dilakukan survei yang dilaksanakan selama 6 bulan, yakni dari Oktober 1959 sampai Maret 1960. Berdasarkan hasil survei itu maka pada 18 April 1960 muncul keputusan penting tentang perlunya suatu proyek eksperimental. Karena proyek eksperimental Karang Taruna itu baru mulai dilakukan pada 26 September 1960 maka hari itu secara historis ditetapkan sebagai hari lahir Karang Taruna.

Menurut Taufan Rotorasiko (2012) catatan penting dari tempat kelahiran Karang Taruna ini adalah sebagai bagian tak terpisahkan dari dinamika masyarakat urban. Sebagai kawasan urban, Kampung Melayu telah memperlihatkan kecenderungan timbulnya banyak masalah sosial di kalangan kaum muda seperti bermain kartu, berjudi

dan mabuk-mabukkan.¹⁹ Pembentukan Karang Taruna dilatarbelakangi oleh banyaknya anak-anak yang menyandang masalah sosial antara lain anak yatim piatu, putus sekolah, mencari nafkah, membantu orang tua dan lainnya. Masalah itu tidak lepas dari kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat pada saat itu. Fase pencanangan di tahun 1960 itu memang diawali dengan adanya kepedulian seorang bernama Ghazali dan rekannya dari YPAY (Yayasan Perawatan Anak Yatim) terhadap kebiasaan anak dan remaja setempat yang mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan cenderung negatif.

Pada dekade pertama berdirinya Karang Taruna (1960-1970an), bangsa Indonesia mulai melaksanakan pembangunan di segala bidang. Departemen Sosial berupaya menumbuhkembangkan Karang Taruna baru di banyak kelurahan melalui kegiatan penyuluhan sosial. Pertumbuhan Karang Taruna saat itu terbilang sangat lambat. Tahun 1969 saja baru terbentuk 12 Karang Taruna. Hal ini disebabkan adanya peristiwa G30S/PKI sehingga pemerintah pada saat itu memprioritaskan untuk berkonsentrasi pada pemulihan stabilitas nasional.

Pada periode selanjutnya, yakni periode 1970 sampai periode 1983 adalah fase pengembangan dimana Karang Taruna masuk ke GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). Sejak dimulainya era Orde Baru memang pertumbuhan Karang Taruna terus meningkat. Di Jakarta saja pada tahun kedua pelita, jumlah Karang Taruna telah mencapai 274 unit. Tahun 1974 jumlah Karang Taruna seluruh Indonesia tercatat ada 620 unit dan melonjak tajam di tahun 1979 menjadi sebanyak 3359 unit.²⁰ Salah satu tokoh yang berjasa mengembangkan Karang Taruna adalah gubernur Jakarta 1966-1977 yakni Ali Sadikin. Saat itu Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan untuk memberi subsidi bagi Karang Taruna dan membantu pembangunan SKKT (Sasana Krida Karang Taruna). Selain itu Gubernur Ali Sadikin juga menginstruksikan jajarannya yakni para walikota, camat, lurah dan Dinas Sosial untuk memfungsikan Karang Taruna. Tahun 1970 Karang Taruna Jakarta membentuk MPKT

¹⁹ Taufan Rotorasiko, 2012, *Jati Diri Karang Taruna Membangun Bangsa*, Jakarta: Penerbit Nusantara Media Baliwangi

²⁰ Idem

(Mimbar Pengembangan Karang Taruna) kecamatan sebagai sarana komunikasi antar Karang Taruna kelurahan. Sejak itu perkembangan Karang Taruna mulai terlihat marak.

Pada 1975 dilangsungkan Musyawarah Kerja Karang Taruna dimana lagu Mars Karang Taruna ciptaan Gunadi Said untuk pertama kalinya dikumandangkan. Tahun 1980 dilangsungkan Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) Karang Taruna di Malang, Jawa Timur. Sebagai tindak lanjut Mukernas, pada 1981 Menteri Sosial mengeluarkan keputusan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna dengan SK/Surat Keputusan No. 13/HUK/KEP/I/1981 sehingga Karang Taruna memiliki landasan hukum yang kuat. Pada tahun 1982 lambang Karang Taruna juga ditetapkan sebagai tindak lanjut Mukernas di Garut Jawa Barat. Dalam lambang itu tercantum tulisan "*Aditya Karya Mahatva Yodha*" yang artinya pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan dan terampil. Pada 1983 MPR/Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN yang di dalamnya menempatkan Karang Taruna sebagai wadah pengembangan generasi muda.

Tahun 1984 sampai dengan berakhirnya era reformasi tahun 1998 ditandai dengan terbentuknya Direktorat Bina Karang Taruna pada 1984. Setelah terbentuknya direktorat itu sampai 1987 banyak pengurus dan anggota Karang Taruna mengikuti Program Nakasone menyongsong abad 21 ke Jepang dalam rangka menambah dan memperluas wawasan serta jaringan. Tahun 1996 bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja, diberangkatkan sekitar 160-an tenaga dari Karang Taruna untuk magang kerja ke Jepang antara 1 sampai 3 tahun dalam upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan Karang Taruna dalam berbagai bidang usaha. Pada 1985 Menteri Sosial menyatakan sebagai tahun Penumbuhan Karang Taruna disusul tahun 1987 sebagai tahun Kualitas Karang Taruna. Tahun 1988 Departemen Sosial bersama dengan Karang Taruna Teladan berhasil merumuskan Pola Gerakan Keluarga Berencana oleh Karang Taruna. Pelibatan Karang Taruna dalam kesehatan reproduksi remaja diadakan agar Karang Taruna dapat berperan sebagai wahana KIE/Komunikasi, Informasi dan Edukasi bagi remaja anggota Karang Taruna.

Pada 1988 juga Departemen Sosial melalui Keputusan Menteri SK No. 11/HUK/1988 menetapkan Pedoman Dasar Karang Taruna. Kegiatan studi karya bhakti, pecan bhakti dan porseni Karang Taruna merupakan kegiatan dalam rangka mempererat hubungan antara Karang Taruna dari sejumlah daerah. Sejak tahun 1988 juga ada SKKT dan BKKT. Sasana Krida Karang Taruna sebagai sarana tempat Karang Taruna berlatih di bidang-bidang pertanian dan peternakan. Bulan Bhakti Karang Taruna diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Karang Taruna dan sebagai forum kegiatan bersama antara Karang Taruna dari sejumlah daerah bersama masyarakat setempat dimana kegiatannya berupa bhakti atau pengabdian masyarakat.

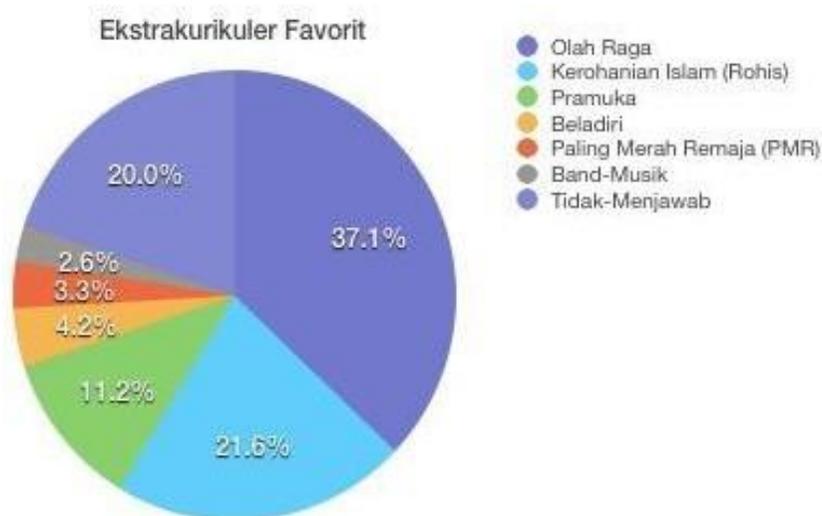
3.2. Pramuka dan Karang Taruna *Jaman Now*: Antara Hambatan dan Peluang

*3.2.1 Pramuka *Jaman Now**

Setelah tumbang rezim Orde Baru pada 1998, perkembangan politik di Indonesia mengalami perubahan dengan adanya reformasi di banyak bidang. Hal ini memengaruhi perkembangan masyarakat secara menyeluruh. Pada 2003 misalnya untuk pertama kalinya pemilihan ketua Kwarnas dilakukan dengan pemilihan langsung oleh ketua Kwarda. Pada 2003 juga mulai muncul pencanangan Revitalisasi Gerakan Pramuka oleh Presiden RI, pembentukan banyak Saka baru dan juga RUU Kepramukaan. Sampai saat ini banyak upaya dilakukan untuk merevitalisasi Gerakan Pramuka yang jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di era Orde Baru makin berkurang peminatnya. Upaya tersebut antara lain melalui regulasi dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan implementasinya oleh pihak terkait. **Pertama**, Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Undang-undang ini mengatur keberadaan Pramuka dari segi asas, fungsi dan tujuan, serta pendidikan kepramukaan. Meskipun secara kelembagaan, (tugas dan wewenang) melekat dalam tanggungjawab ab pemerintah, hak dan kewajibannya memiliki otonomi yang kuat untuk melaksanakan pendidikan kepemudaan bagi generasi muda, baik di sekolah maupun di luar sekolah. **Kedua**, Permendikbud No. 63 Tahun 2014 tentang ekstrakurikuler kepramukaan yang mengatur secara

eksplisit tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib disekolah

Sayangnya kelihatannya ikhtiyar di atas belumlah cukup. Peminat Pramuka di sekolah-sekolah belum menggembirakan. Hasil survei Setara Institute pada 2016 menemukan bahwa terkait ekstrakurikuler favorit yang diminati siswa, Pramuka hanya diminati oleh 11,2 % siswa dan menempati posisi ke-3 di bawah ekstrakurikuler olah raga (37,1 %) dan ekstrakurikuler kerohanian Islam/Rohis (20 %).²¹



Hasil survei di atas menunjukkan bahwa Pramuka sekarang kurang diminati para siswa, memang menarik dan cukup mengejutkan. Oleh karena itu Tahun 2017 PIEC (Paramadina Institute of Ethic and Civilization) mencoba melakukan asesmen dengan wawancara mendalam terhadap lebih dari 100 siswa anggota dan pengurus, serta terhadap pembina Pramuka tingkat SLTA di 4 kota yakni Bogor, Sukabumi, Serang dan Pandeglang. Hasilnya adalah sebagai berikut

²¹ Setara Institute, 2015, *Survei Toleransi Agama Siswa-Siswi SMA di Jakarta dan Bandung Raya*, Jakarta: Setara Institute

Tabel Hambatan & Peluang Revitalisasi Pramuka

Hambatan	Peluang
Bukan Prioritas Sekolah (<i>Academic-oriented</i>)	Penanaman Nilai Nasionalisme
Kurikulum 2013 (bikin lelah)	Tradisi dan Sejarah Pramuka Yang Panjang
Banyak Alternatif Lain (Terutama yang berbasis teknologi & internet)	Jumlah Anggota Yang Besar & Tersebar Sampai Pelosok
Kesan Siswa (Kurang Kekinian & Semi-Militer)	Dukungan Pemerintah
Kurangnya Jumlah Pembina Pramuka	
Lemahnya Koordinasi Instansi Terkait	

Sejumlah faktor telah menjadi hambatan dalam pengembangan kegiatan Pramuka. Hambatan tersebut muncul dari kebijakan institusi sekolah, minat pelajar, dan kebijakan yang lebih makro (dari pemerintah).

Pertama, sebagian besar pimpinan sekolah tidak menjadikan Pramuka sebagai prioritas dalam kegiatan ekstrakurikuler dan lebih fokus ke aspek akademik para siswa, akibatnya Pramuka tidak berkembang. Memang masih banyak sekolah yang punya pandangan tradisional seperti itu. Seorang siswa akan dianggap berprestasi di sekolah bila nilai akademisnya bagus. Akibatnya sekolah akan berlomba-lomba untuk mendorong siswanya agar fokus pada urusan akademik saja. Sebenarnya dunia pendidikan di Indonesia sudah mulai dikenalkan paradigma kecerdasan-jamak (*multiple intelligence*) sejak 2003, suatu konsep yang digagas oleh Howard Gardner, seorang profesor psikologi dari Universitas Harvard Amerika. Gardner mengidentifikasi kecerdasan yang tidak melulu soal kognitif siswa tapi lebih luas dimensinya seperti musik, logika, visual, verbal, interpersonal, intrapersonal dan naturalistik. Dengan paradigma seperti itu, pendidikan tidak hanya berorientasi pada hal akademis seperti nilai mata pelajaran bagus, tapi juga bagaimana mengembangkan minat dan bakat siswa dalam bidang-bidang sesuai *multiple intelligence* di atas. Pendidikan karakter yang digagas

oleh Presiden Jokowi melalui Perpres No. 87 Tahun 2017 sebenarnya juga dalam rangka implementasi paradigma *multiple intelligence* seperti di atas. Oleh karena itu, mulai tahun 2018 ada rencana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar semua sekolah menerbitkan rapor dengan nilai ganda. Para guru nantinya akan memberi laporan nilai akademis dan pengembangan kepribadian siswa.²²

Pramuka adalah pendidikan non-formal yang sangat baik sebagai media penguatan pembentukan karakter siswa. Namun demikian, hasil asesmen PIEC (2018) menemukan banyak sekolah yang masih berorientasi akademis siswa sehingga kegiatan Pramuka di sekolah itu tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Ada beragam alasan mengapa hal itu terjadi seperti nilai UN sekolah yang tidak bagus sehingga lulusannya tidak bisa terserap ke sekolah favorit, minimnya sarana pra-sarana untuk pengembangan kegiatan Pramuka dan lain sebagainya.

Kedua, pelaksanaan kurikulum 2013 dirasakan telah membuat para siswa menjadi kelelahan karena beban mata pelajaran yang banyak dan rumit. Meskipun kemudian ada Kurikulum 2013 edisi revisi melalui Permendikbud No. 20, 21, 22 dan 23 Tahun 2016, akan tetapi banyak sekolah belum mengimplementasikan Kurikulum Revisi karena alasan yang beragam terutama karena pihak sekolah merasa belum siap. Hasil asesmen PIEC (2018) menemukan bahwa para siswa mengeluh kelelahan dengan pelaksanaan Kurikulum 2013 karena pulangannya lebih sore (dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya yakni KTSP 2006). Misalnya penambahan jumlah jam belajar di SD yang sebelumnya 26 jam per-minggu menjadi 32 jam per-minggu. Meski demikian, ada pemangkasan jumlah mata pelajaran dari 10 menjadi 6 mata pelajaran. Di SMP juga ada penambahan jumlah jam pelajaran dari sebelumnya 32 jam per-minggu menjadi 38 jam per-minggu. Jadi, dalam Kurikulum 2013 ini jumlah mata pelajaran dikurangi tapi jam mata pelajarannya ditambah dan inilah yang menyebabkan kelelahan yang dikeluhkan para siswa sehingga berimbas pada menurunnya minat mereka untuk aktif di kegiatan Pramuka.

²² Lihat "Penguatan Pendidikan Karakter Tak Melalui Soal Akademis", www.kompas.com Sabtu 30 September 2017.

Menurut Ahmad Jumal (2015) perubahan kurikulum dari waktu ke waktu disebabkan kebutuhan masyarakat yang berkembang dan juga tuntutan zaman yang selalu berubah. Begitu juga dengan latar belakang munculnya Kurikulum 2013 melalui Permendikbud No. 54 Tahun 2013. Sebenarnya ada beberapa keunggulan juga dari Kurikulum 2013 di antaranya; (1) siswa dituntut lebih aktif dan kreatif serta bisa memecahkan masalah, (2) penentuan nilai siswa tidak hanya ujian saja tapi juga kesopanan, agama, praktik, sikap dan lainnya, (3) integrasi pendidikan karakter dan budi pekerti ke dalam semua mata pelajaran, (4) adanya fungsi dan kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dan (5) tanggap terhadap fenomena dan perubahan sosial. Namun demikian, Kurikulum 2013 juga dianggap memiliki beberapa kelemahan antara lain; (1) Kreativitas dalam pengembangan silabus makin berkurang, (2) Terlalu banyak materi yang harus dikuasai para siswa sehingga mereka stres dan kelelahan, (3) Dukungan teknologi informasi yang belum memadai dan lain sebagainya.

Ketiga, hambatan lain dari para pelajar sendiri yakni munculnya bentuk-bentuk baru kegiatan pemuda berbasis teknologi telah menimbulkan kesan kegiatan Pramuka ketinggalan jaman dan tidak menarik. Hampir 71% responden yang diwawancarai menyatakan bahwa belajar semaphore, sandi, morse, simpul dan ikatan, serta komunikasi udara, dan lainnya dalam kegiatan kepramukaan tidak menarik. Sebaliknya, internet, media sosial, dan permainan di komputer telah menjadi kegiatan umum bagi pemuda di luar jam sekolah.

Misalnya sandi morse. Ini adalah representasi huruf, angka dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode yang dalam kepramukaan menggunakan peluit atau senter. Sandi Morse ditemukan oleh Samuel Morse pada tahun 1835. Kode Morse disampaikan dengan cara meniup peluit dan atau menyalakan senter dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup peluit panjang untuk mewakili garis.²³

Menurut hasil asesmen PIEC (2018) kegiatan seperti ini dianggap para siswa sudah kuno dan ketinggalan jaman serta kurang menarik. Menurut para siswa, aplikasi permainan Pokemon-Go yang

²³Saodah, 2017, *Panduan Pendidikan Kepramukaan*, Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru

beberapa waktu lalu sempat heboh dianggap jauh lebih kekinian dan menarik. Pokemon-Go adalah permainan realitas melalui perangkat internet yang dikembangkan oleh Niantic, sebuah perusahaan sempalan milik Google yang tersedia untuk perangkat internet iOS dan Android. Permainan ini memungkinkan pemainnya untuk menangkap, melatih dan menukar serta mempertarungkan setiap karakter Pokemon yang ada di internet di setiap tempat/lokasi di dunia nyata.²⁴



Game Pokemon-Go

(Sumber: www.wikipedia.or.id, diakses 20 Februari 2018)

Keempat, kegiatan Pramuka dianggap kurang menarik karena kesan yang timbul di kalangan para siswa, bahwa Pramuka identik dengan semi-militer: kedisiplinan tinggi, kekerasan, seperti verbal *bullying* membentak-bentak dan lainnya. Berikut ini beberapa kutipan pendapat para siswa terkait opini bahwa Pramuka identik dengan semi-militer dalam asesmen PIEC (2017).

"Pramuka banyak disorot teman-teman non-Pramuka karena kegiatan yang identik hari jumat ini kegiatannya agak terlihat keras karena kedisiplinan yang diterapkan tanpa pandang bulu"

"Setiap anggota Pramuka dituntut untuk menaati setiap kode etik yang ada dalam Pramuka. Kode etik tersebut setiap anggota wajib menaatinya karena jika tidak maka akan mendapat sanksi nantinya. Terkadang sanksi itu berupa sanksi fisik seperti berlari, push-up dan

²⁴ Jeffrey Matulef, 2016, "Pokemon-Go Is Out Now in Australia and New Zealand", dalam *Eurogamer*, 8 Juli 2016.

sejenisnya. Mungkin dari situ teman-teman lain mengidentikan Pramuka dengan semi-militer”



Aktivitas Latihan Pramuka Semi-Militer

(Sumber: www.kalsel2.kemendiknas.go.id, diakses 20 Februari 2018)

“Pramuka memang seperti mengajari cara hidup militer. Maksudnya cara hidup agar kita menjadi sosok yang kuat dan tangguh. Belum lagi tugas menjaga kedaulatan NKRI. Cara militer juga membuat kita tidak takut bahaya serta terlatih dengan kedisiplinan tinggi. Ini yang banyak disalah pahami teman-teman saya”

Kelima, ada juga hambatan yang berasal dari masih kurangnya jumlah pembina Pramuka di beberapa sekolah. Terutama pembina yang sudah lulus KMD/Kursus Mahir Dasar dan KML/Kursus Mahir Lanjutan. Idealnya, 1 pembina mengampu 150 sampai 200 anggota Pramuka. Tapi di beberapa sekolah yang jumlah siswanya di atas 1000 mereka hanya memiliki 1 atau 2 pembina yang sudah lulus KMD dan KPL. Akibatnya pembinaan pendidikan kepramukaan kurang berjalan sebagaimana mestinya.

KMD diperuntukkan bagi para pembina gugus depan, calon pembina gugus depan, anggota mabi, andalam kwartir, dan orang dewasa lainnya yang telah atau pernah menjadi anggota Pramuka serta memiliki kemauan untuk menjadi seorang pembina Pramuka.

Setiap lulusan KMD, wajib melaksanakan masa pengembangan yang disebut Narakarya I . Pada tahap ini lulusan KMD mempraktikkan apa yang telah didapatkan selama KMD di gugus depannya dengan didampingi oleh pelatih pembina. Masa Narakarya I ini minimal selama 6 bulan. Bagi pembina yang telah melaksanakan masa pengembangan ini berhak mendapatkan SHB (Surat Hak Bina) dan bisa mengikuti KML. Pada jenjang KML, lulusan KMD akan memilih spesialisasi yakni menjadi pembina siaga, penggalang, penegak atau pembina pandega. Setelah lulus KML juga wajib mempraktikkan apa yang didapatkan melalui masa pengembangan Narakarya II. Setelahnya pembina dapat dikukuhkan menjadi pembina mahir oleh Pusdiklacab (Pusat Pendidikan dan Latihan Cabang) atau mengenakan selendang Mahir dan pita mahir sesuai dengan golongannya yaitu mahir siaga, penggalang, penegak atau mahir pandega.²⁵

Keenam, hambatan lainnya adalah koordinasi yang kurang baik di kementerian terkait (Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenpora) yang tercermin pada masih banyaknya tumpang tindih kebijakan dan juga implementasinya. Misalnya, anggota Pramuka terutama tingkat siaga dan penggalang berusia 7-17 tahun dan ini menurut Adhyaksa Dault, Ketua Kwarnas jumlahnya 60-70%. Hal ini menjadikan posisi Kwarnas di bawah Kemenpora menjadi kurang efektif. Sementara induk gerakan Pramuka yakni kwartir nasional (kwarnas) tidak berada di bawah Kemendikbud melainkan di bawah Kemenpora yang mengurus pemuda dan olahraga dimana pemuda adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas. Menurut Adhyaksa, Kemenpora lebih banyak mengurus bidang politik dan sosial, sementara Pramuka bukan termasuk organisasi masyarakat melainkan pendidikan non-formal. Oleh karena itu menurut Dault, Pramuka sebaiknya dikembalikan ke asalnya yakni di bawah Kemendikbud.

Menanggapi hal ini, Kemenpora Imam Nahrawi menyatakan setuju. Akan tetapi, lanjut Nahrawi, untuk melakukan hal itu diperlukan revisi UU Kepramukaan melalui prolegnas (program legislasi nasional) dan

²⁵ Lihat www.pramuka.or.id

ini butuh waktu yang lama serta butuh diskusi yang panjang dengan pihak-pihak terkait utamanya Kemendikbud.²⁶

Namun uniknya, Mendikbud Muhadjir Effendi kepada kompas.com pada Agustus 2017 menyatakan tidak setuju dengan usulan untuk memindahkan gerakan Pramuka di bawah Kemendikbud. Menurut Muhadjir gerakan Pramuka lebih cocok di bawah Kemenpora seperti diatur dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2010 tentang gerakan Pramuka. Alasannya karena Pramuka memiliki spektrum keanggotaan yang luas, tidak terbatas pada para pelajar saja sehingga lebih cocok dibawah Kemenpora. Memang Kemendikbud bisa mendukung kegiatan-kegiatan Pramuka yang terkait pelajar dan atau sekolah.²⁷

Peluang

Sampai saat ini Pramuka masih dipandang sebagai medium penanaman nilai-nilai nasionalisme paling efektif di kalangan pelajar. Ketika banyak pelajar mengalami kelunturan nasionalisme, gerakan Pramuka bisa diharapkan menjadi media yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini melalui penghayatan dan pengamalan Tri Satya dan Dasa Dharma sebagai pedoman dasar Pramuka. Pramuka juga mempunyai tradisi dan sejarah panjang yang telah ditorehkan sebagai organisasi dengan jumlah anggota yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia; dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar sampai ke pelosok desa dan pedalaman. Data menyebutkan bahwa anggota Pramuka jumlahnya sekarang lebih dari 20 juta; baik dari SD, SMP maupun SMA. Apalagi sejak tahun 2014 dimana Permendikbud menyatakan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib sehingga semua sekolah otomatis memiliki aktivitas pendidikan kepramukaan.

3.2.2 Karang Taruna *Jaman Now*

Periode 1997 sampai 2004 ditandai dengan munculnya krisis moneter yang terjadi di tahun 1997. Krisis itu berkembang menjadi krisis

²⁶ Lihat "Tak Efektif Di Bawah Kemenpora, Pramuka Minta Pindah Ke kemendikbud" dalam www.republika.co.id, 24 Juli 2015

²⁷ Lihat "Mendikbud Tak Sepakat Jika Pramuka Diwacanakan Dibawah Kemendikbud" dalam www.nasional.kompas.com 21 Agustus 2017

ekonomi dan bahkan menjadi krisis multidimensi. Imbas dari krisis tersebut tak urung juga berdampak pada lambannya perkembangan Karang Taruna. Puncaknya pada saat era pemerintahan Presiden Gus Dur (1999-2000) ketika Departemen Sosial dibubarkan dan diganti menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, Karang Taruna pada umumnya mengalami stagnasi bahkan mati suri. Konsolidasi organisasi terganggu, aktivitas terhambat dan bahkan cenderung berhenti. Hal itu menyebabkan kualifikasi Karang Taruna menurun drastis meskipun masih ada beberapa Karang Taruna yang tetap eksis. Pada tahun 2001 Temu Karya Nasional (TKN) Karang Taruna dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Hasilnya antara lain menambah nama Karang Taruna menjadi KTI /Karang Taruna Indonesia, memilih ketua umum pengurus nasional KTI , serta menyusun pedoman dasar dan pedoman rumah tangga KTI.

Pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2005, diselenggarakan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Karang Taruna di Jakarta dalam rangka menyusun program kerja. Pada tahun yang sama Menteri Sosial mengeluarkan Permensos/Peraturan Menteri Sosial RI No. 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (pengganti Keputusan Mensos RI No. 11/HUK/1988), sebagai tindak lanjut TKN Karang Taruna V bulan April 2005 di Banten. Pada tahun yang sama juga diselenggarakan BBKT dan SKBKT di Yogyakarta yang dihadiri lebih dari 3000 anggota dan pengurus Karang Taruna dari seluruh Indonesia.

Memang sejak tahun 2005 berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengembangkan kembali Karang Taruna. Hal itu dibuktikan dengan masuknya nama Karang Taruna dalam beberapa regulasi dan produk hukum yang di dalamnya menempatkan Karang Taruna dengan segala peran dan fungsinya. **Pertama**, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 13 dinyatakan Karang Taruna sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa. **Kedua**, Permendagri No. 5 Tahun 2007 pasal 1 yang mengatur pedoman penataan lembaga kemasyarakatan secara umum, termasuk Karang Taruna. **Ketiga**, Permensos No. 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Karang Taruna yang mengatur; (a) ketentuan umum, (b) asas dan tujuan, (c) kedudukan,

tugas pokok dan fungsi, (d) keorganisasian, keanggotaan dan kepengurusan, (e) mekanisme kerja, (f) pembina Karang Taruna, (g) program kerja, (h) tanggung jawab dan wewenang, (i) pengukuhan dan pelantikan, (j) keuangan, (k) identitas dan lambing, dan (l) penutup. **Keempat**, Permensos No. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna yang mengatur; (a) ketentuan umum, (b) kelembagaan, (c) pemberdayaan Karang Taruna, (d) pengelolaan sumber daya, (e) kewenangan, (f) koordinasi, (g) pendanaan, (h) pemantauan dan evaluasi, (i) pelaporan, (j) pembinaan dan pengawasan, (k) ketentuan penutup.

Meskipun sejak tahun 2010 ada fase pencerahan dimana fase ini diluncurkan program taruna wira usaha (Taruna Wira Karang Taruna), akan tetapi hasilnya sampai sekarang belum menggembirakan. Eksistensi Karang Taruna secara teoritis ditentukan oleh 3 pilar utama yakni; pendidikan, pengorganisasian dan pemberdayaan. Akan tetapi ketiga hal itu belum berjalan secara baik di banyak Karang Taruna sehingga eksistensi dan aktivitas mereka masih jauh sekali dari ideal. Oleh karena itu tahun 2017 PI EC (Paramadina Institute of Ethic and Civilization) mencoba melakukan asesmen dengan melakukan wawancara mendalam terhadap lebih dari 100 pemuda anggota dan pengurus serta terhadap pembina Karang Taruna di 4 kota yakni Bogor, Sukabumi, Serang dan Pandeglang. Hasilnya adalah sebagai berikut

Tabel Hambatan & Peluang Revitalisasi Karang Taruna

Hambatan	Peluang
Minim Dukungan Kepala Desa	Gotong-royong
Kurang Kegiatan Produktif	Tradisi & Sejarah Panjang Karang Taruna
Banyak Alternatif Lain	Minim Kriminalitas
Pembinaan Kurang Berkelanjutan	Dukungan Pemerintah
Lemahnya Koordinasi Instansi Terkait	

Sejumlah tantangan telah meminggirkan perannya sebagai organisasi pemuda di desa-desa. Secara internal, kebanyakan anggota, umumnya lebih dari 60% anggota Karang Taruna adalah

pengangguran dan berpendidikan rendah (lulusan SMA dan bahkan ada yang hanya SMP dan SD). Hal ini berakibat pada rendahnya tingkat kreativitas dan produktifitas Karang Taruna. Baik Karang Taruna di kota (Bogor dan Serang), maupun di desa (Sukabumi dan Pandeglang), persentasenya sama-sama tinggi yang pengangguran dan berpendidikan rendah lebih dari 60%. Sementara secara eksternal, munculnya banyak NGO, Ormas, dan partai politik sebagai alternatif yang lebih menarik minat pemuda, khususnya dari sisi finansial. Ini mengkonfirmasi cerita di balik profil pemuda pelaku bom JW Marriot. Dani Dwi Permana (17 tahun) awalnya adalah anggota Karang Taruna di desanya di Bogor. Namun karena dari keluarga miskin dan kesulitan membayar biaya sekolah SMA-nya, Dani lebih memilih aktif sebagai marbot (penjaga musholla) di desanya dimana dia mendapatkan bantuan biaya sekolah dan sedikit uang saku. Lama-lama Dani meninggalkan sama sekali aktivitasnya di Karang Taruna. Dari kasus ini merefleksikan bahwa meskipun Karang Taruna adalah organisasi pemerintah, perhatian yang kurang turut menjadikan anggotanya kurang memiliki nilai nasionalisme yang kuat. Aspek lain seperti kemiskinan, ideologi ekstremisme agama dan sejenisnya bisa menggerus nilai-nilai itu seperti pada kasus Dani.

Faktor utama yang juga menjadi masalah dalam upaya pengembangan Karang Taruna adalah minimnya dukungan desa. Kebanyakan Karang Taruna yang maju didukung oleh faktor kepemimpinan yang kuat dari kepala desanya. Ada beberapa kasus Karang Taruna maju namun kepala desa kurang mendukung, kemudian pada periode kepemimpinan selanjutnya, sang ketua Karang Taruna terpilih menjadi kepala desa. Artinya, sebenarnya Karang Taruna memiliki posisi yang strategis di desa hanya terkadang masih kurang disadari.

Memang sesuai Permendes tentang Prioritas Dana Desa (Permendes No 19 Tahun 2017), Pedoman Musyawarah Desa (Permendes No 2 Tahun 2015) dan peraturan terkait lainnya, Karang Taruna bisa terlibat dalam perumusan alokasi dana desa dari 7 sumber anggaran desa. Akan tetapi dari 3 pola pengambilan keputusan yakni politis, teknokratis dan partisipatoris, menurut responden asesmen PIEC (2017) pola politis lebih dominan. Jadi keputusan tentang alokasi dana desa sangat ditentukan oleh kedekatan

dengan kepala desa. Beberapa Karang Taruna yang program-programnya disetujui oleh musyawarah desa untuk dibiayai biasanya karena faktor kedekatan dengan kepala desa bukan karena dukungan SDM Karang Taruna yang memadai (pola partisipatoris), ataupun karena program-program yang diajukan Karang Taruna dirasakan penting untuk dilakukan dan akan bermanfaat bagi masyarakat desa (pola teknokratis).

Selain banyak responden asesmen PIEC (2017) yang menyatakan bahwa kegiatan Karang Taruna lebih banyak kegiatan yang kurang produktif terutama seni dan budaya. Memang sesuai Permensos No 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, terdapat 4 kegiatan utama Karang Taruna yakni; (1) Olah raga, seni dan budaya, (2) Ketahanan nasional, (3) UEP/usaha ekonomi produktif, dan (4) UKS/usaha kesejahteraan sosial. Menurut responden asesmen, kegiatan Karang Taruna lebih banyak dalam hal olah raga dan seni budaya, itupun terbatas pada acara-acara tertentu seperti Hari Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus. Namun demikian kegiatan olahraga dan seni itu masih sebatas pertunjukan yang tidak berorientasi pada produktivitas, misalnya jika Karang Taruna memiliki klub sepak bola ataupun seni budaya maka bisa tampil dan menjadi profesi sampingan para anggotanya. Selama ini yang ada adalah tim sepak bola sementara, kelompok tari sementara, kelompok musik sementara dan lainnya. Kegiatan ketahanan nasional, menurut para responden, kebanyakan bersifat *top-down* atau inisiatif dari atas. Jadi Karang Taruna sebatas menunggu. Jadi kadang bertahun-tahun tidak ada kegiatan ketahanan nasional baik seminar bela negara, sosialisasi 4 pilar, dan sejenisnya. Jarang sekali ada Karang Taruna yang menyelenggarakan kegiatan ketahanan nasional atas inisiatif sendiri. Sementara itu UEP dan UKS menurut para responden jumlah dan jangkauannya masih sangat terbatas.

Masalah lainnya adalah kebijakan pemerintah yang mendukung mereka untuk bisa semakin kreatif dan produktif juga dianggap belum merata dan belum berkelanjutan. Sesuai Permensos No. 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna memang Kemensos mendapat amanah sebagai pembina Karang Taruna. Bahkan di Kemensos ada lembaga khusus yang menangani Karang Taruna yakni Sub-Direkrotat Karang Taruna di bawah Direktorat PKKS (Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial). Akan tetapi

berdasarkan hasil asesmen PIEC (2017), Karang Taruna terutama di pelosok desa merasa kurang mendapat cukup pembinaan dari Kemensos. Sementara Karang Taruna yang beberapa kali mendapat pembinaan menganggap kurang berkelanjutan.

Peluang

Peluang dan keunggulan dari Karang Taruna tercermin dalam semangat gotong royong antar setiap anggota dalam berbagai kegiatan. Karang Taruna juga masih menjadi wadah kegiatan kepemudaan yang bisa mengurangi tingkat kriminalitas di lingkungan masyarakat desa dan kelurahan. Ini terlihat dari kebiasaan koordinasi Karang Taruna dengan aparat kepolisian, sehingga pengawasan yang menyangkut urusan keamanan dan ketertiban di desa bisa dilaksanakan secara baik.

3.3 Pramuka, Karang Taruna & Daya Tahan Pada Ekstremisme Kekerasan

PI EC (2017) juga melakukan survei untuk mengetahui daya tahan Pramuka dan Karang Taruna terhadap ekstremisme kekerasan. Hasilnya adalah sebagai berikut;



KS: kurang sekali; K: kurang; B: baik; BS: baik sekali.

Yang diberi warna merah masuk dalam kategori 'early warning'

Berdasarkan tabel di atas, ada beberapa hal yang menjadi keunggulan Pramuka dalam meredam ekstremisme-kekerasan. Daya tahan Pramuka terhadap propaganda ideologi radikalisme dan ekstremisme secara umum baik; rata-rata 67% menjawab B/Baik dan Baik Sekali, dan hanya 33% yang menjawab K/Kurang dan KS/Kurang Sekali

Dalam hal toleransi agama aspek keimanan, ritual agama dan pengalaman agama juga cukup baik (rata-rata 85% menjawab Baik dan Baik Sekali). Para siswa merasa memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama yang mereka anut, mereka juga rutin beribadah terutama sholat lima waktu, zakat dan puasa serta ibadah lain terutama sedekah. Para siswa juga merasa bahwa pengalaman keagamaan mereka memberi pengaruh positif pada stabilitas emosi, pertimbangan perilaku dan penyesalan setelah melakukan kesalahan. Hanya pengetahuan agama (karena responden yang diteliti berasal dari SMA, SMK dan MA saja, maka hanya responden dari MA yang mengakui baik) dan konsekuensi sosial perlu diperbaiki (mereka bingung dengan batas-batas praktik toleransi). Rata-rata untuk dua hal itu hanya 35% siswa yang menjawab Baik dan Baik Sekali. Para siswa MA/Madrasah Aliyah mendapatkan pelajaran agama hampir tiap hari dan 5-6 hari selama seminggu sekolahnya dan secara komprehensif mulai dari *fiqih*, *tarikh-tasyri*, qur'an-hadist, dan lainnya. Sementara para siswa SMA dan SMK hanya mendapatkan pelajaran agama secara umum dan hanya 2 jam dalam seminggunya.

Sementara nasionalisme Pramuka secara umum baik terutama aspek kebanggaan, kesatuan dan rela berkorban (rata-rata 87% menjawab Baik dan Baik Sekali). Para siswa anggota Pramuka merasa memiliki kebanggaan sebagai warga negara Indonesia karena mereka menganggap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, penduduknya banyak, banyak budaya, suku dan agama serta sekarang makin maju secara ekonomi. Para siswa juga merasa bahwa persatuan sangat penting meski berbeda-beda suku, bahasa dan agamanya. Para siswa merasa rela berkorban untuk bangsanya, akan tetapi karena sekarang bukan jaman perang mereka merasa cara berkorbannya ialah dengan belajar keras untuk memajukan bangsa. Aspek ketaatan belum baik (ini sebenarnya masalah umum

masyarakat Indonesia) dan kontribusi (karena masih muda). Rata-rata untuk dua hal itu hanya 42% siswa yang menjawab Baik dan Baik Sekali. Para siswa merasa ada dilema ketika berada di ruang publik. Di satu sisi mereka diajarkan disiplin dan menaati peraturan di Pramuka, tapi di sisi lain mereka melihat masyarakat banyak yang tidak disiplin dan melanggar peraturan. Mereka kadang menegur tetapi tidak dihiraukan dan kadang mereka mengakui juga ikut-ikutan tidak disiplin dan melanggar peraturan.

DAYA TAHAN KARANG TARUNA

Toleransi Agama

- Keimanan (KS5%, K20%, B60%, BS15%)
- **Pengetahuan Agama (KS10%, K50%, B25%, BS15%)**
- Ritual Agama (KS0%, K20%, B45%, BS35%)
- Pengalaman Agama (KS0%, K15%, B70%, BS15%)
- **Konsekwensi Sosial (KS5%, K55%, B15%, BS25%)**

Nasionalisme

- **Kebanggaan (KS10%, K45%, B35%, BS10%)**
- **Ketaatan (KS5%, K50%, B45%, BS5%)**
- Kesatuan (KS5%, K25%, B35%, BS35%)
- **Kontribusi (KS0%, K10%, B55%, BS35%)**
- **Rela berkorban (KS5%, K15%, B40%, BS40%)**

KS: kurang sekali; K: kurang; B: baik; BS: baik sekali.

Yang diberi warna merah masuk dalam kategori 'early warning'

Berdasarkan tabel di atas, daya tahan Karang Taruna terhadap propaganda ideologi ekstremisme secara umum baik, rata-rata 65% menjawab B/Baik dan Baik Sekali, dan hanya 35% yang menjawab K/Kurang dan KS/Kurang Sekali

Dalam hal toleransi agama aspek keimanan, ritual agama dan pengalaman agama cukup baik. Rata-rata 80% menjawab Baik dan Baik Sekali. Para anggota Karang Taruna merasa memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama yang mereka anut. Mereka juga merasa bahwa pengalaman keagamaan mereka memberi pengaruh positif pada stabilitas emosi, pertimbangan perilaku dan penyesalan setelah melakukan kesalahan. Hanya pengetahuan agama dan konsekuensi sosial perlu diperbaiki (sebagaimana pada Pramuka, mereka juga bingung tentang batas-batas praktik toleransi). Rata-

rata untuk dua hal itu hanya 40% siswa yang menjawab Baik dan Baik Sekali. Para anggota Karang Taruna umumnya tidak memiliki pengetahuan agama yang baik. Sedikit sekali dari mereka yang alumni madrasah, pesantren dan IAIN, persentasenya di bawah 30%. Kebanyakan adalah lulusan SMA, SMK, SMP dan SD. Mayoritas atau lebih dari 50% adalah lulusan SMA dan SMK.

Sementara nasionalisme Karang Taruna secara umum baik terutama pada aspek kesatuan, kontribusi dan rela berkorban. Rata-rata 80% menjawab Baik dan Baik Sekali. Para anggota Karang Taruna merasa bahwa persatuan sangat penting meski berbeda-beda suku, bahasa dan agamanya. Mereka merasa rela berkorban untuk bangsanya, termasuk untuk berperang melawan negara lain atau ikut kegiatan bela bangsa seperti wajib militer dan sejenisnya. Hanya aspek kebanggaan dan ketaatan masih harus diperbaiki. Rata-rata untuk dua hal itu hanya 47% yang menjawab Baik dan Baik Sekali. Para anggota Karang Taruna umumnya mengaku bangga menjadi bangsa Indonesia, karena itu bangsa yang besar, kaya sumber daya alam, kaya akan budaya dan suku bangsa. Akan tetapi mereka juga kecewa dengan modal kekayaan sumber daya alam dan budaya mereka yang masih miskin. Mereka juga tidak bangga karena korupsi di Indonesia masih tinggi dilakukan oleh para pejabat dan elit di Indonesia yang menurut mereka sebenarnya justru sudah kaya perekonomiannya. Para anggota Karang Taruna merasa ada dilema ketika berada di ruang publik. Di satu sisi mereka sadar bahwa tidak disiplin dan tidak menaati peraturan akan merusak ketertiban sosial, tapi di sisi lain mereka melihat masyarakat banyak yang tidak disiplin dan melanggar peraturan. Mereka kadang menegur tetapi tidak dihiraukan dan kadang mereka mengakui juga ikut-ikutan tidak disiplin dan melanggar peraturan.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1 Pramuka

Untuk kepala sekolah sebagai Mabungus: harus memberikan dukungan penuh terhadap Pramuka. Dukungan tersebut dapat berupa himbauan, pengawasan, dukungan material, dukungan moril agar Pramuka disekolah masing-masing makin diminati para

siswa dan makin aktif dalam berkegiatan. Apalagi sesuai dengan Permendikbud, Pramuka adalah ekstrakurikuler wajib. Kepala sekolah juga harus melibatkan para orang tua dan pihak-pihak lainnya yang terkait untuk memajukan Pramuka di sekolahnya. Jangan sampai karena alasan-alasan seperti fokus ke akademik para siswa, atau memprioritaskan ekstrakurikuler lain seperti olah raga, paskibra, rohis dan lainnya sehingga Pramuka kurang diperhatikan.

Untuk Kemendikbud: dalam rencana revisi Permendikbud No 63/2014 tentang Pramuka Sebagai Ekstrakurikuler wajib perlu menyertakan usulan agar Pendidikan Kepramukaan juga menjadi media sosialisasi CVE (*Countering Violent Extremism*), khususnya melalui model blok (MPLS/masa pengenalan lingkungan sekolah), selain model aktualisasi dan reguler. Di model blok sosialisasi lebih kepada pengetahuan umum tentang CVE (mengenal bahaya ekstremisme-kekerasan, ideologi dan aktivismenya dan sebagainya). Sementara di model aktualisasi dan reguler lebih secara khusus tentang bagaimana menangani ekstremisme-kekerasan di kalangan siswa, bagaimana mencegahnya, bagaimana bentuk kampanye yang efektif dan sejenisnya. Revisi juga harus memperjelas implementasi Permen mengenai OTK/Organisasi Tata Kelola agar masalah kekurangan pembina Pramuka di sekolah seperti dikeluhkan dalam riset asesmen PIEC (2017) dan juga FGD Pramuka bisa diatasi.

Untuk BNPT & Kwarnas: agar menjadikan semangat anti-ekstremisme kekerasan menjadi salah satu krida (atau sekumpulan kecakapan khusus) di bawah saka (satuan karya) Bhayangkara yang sudah ada. Kecakapan khusus yang diperlukan antara lain; pengetahuan tentang ekstremisme-kekerasan baik ideologi maupun aktivitasnya, bagaimana mengidentifikasi awal ideologi tersebut menjangkiti para siswa, bagaimana penanganannya, bagaimana pencegahan atau kampanye efektifnya agar ideologi ekstremisme-kekerasan tidak menjangkiti sekolah dan lainnya).

Untuk Kemendikbud dan Kemenpora; perlu diperjelas UU Kepramukaan apakah tetap dibawah Kemenpora atau Kemendikbud karena Pramuka selain berbasis sekolah juga usia mulai 7-25 tahun sementara Kemenpora dalam urusan pemuda usia mulai 17-45. Sebaiknya ada revisi UU Kepramukaan agar gerakan

Pramuka berada dibawah Kemendikbud, tidak di Kemenpora.

4.2 Karang Taruna

Untuk kepala-desa & lurah: Karena secara kebijakan sudah diatur alokasi dana desa. Masalah muncul pada implementasi di lapangan. Kepala desa harus mendukung penuh kegiatan Karang Taruna di desa masing-masing terutama melalui alokasi dana desa dari 7 sumber untuk program Karang Taruna yang bisa dimanfaatkan, salah satunya untuk kegiatan CVE. Kegiatan bisa berupa sosialisasi, simulasi penanganan, pencegahan dan sejenisnya. Untuk kelurahan karena tidak mendapat dana desa, maka diharapkan mampu mendorong Karang Taruna memanfaatkan dana bantuan lain dari pemerintah (melalui Perda, Musrenbang dll) dan non-pemerintah seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan lainnya untuk kegiatan Karang Taruna baik seni dan olah raga, ketahanan nasional, usaha ekonomi kreatif, maupun usaha kesejahteraan sosial termasuk kegiatan CVE seperti di atas.

Untuk BNPT: perlu memanfaatkan Karang Taruna secara optimal dalam kegiatan CVE, perlu mengembangkan potensinya sebagai forum diseminasi nilai-nilai nasionalisme dan toleransi bagi kaum muda guna menjaga visi nasionalisme anggotanya secara umum terjamin, dengan program-program yang tersebar luas bagi Karang Taruna di semua desa/kelurahan di Indonesia, dan langsung bersentuhan dengan kaum muda di masing-masing wilayah.

Untuk Kemendes: revisi Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa dan Permendes terkait lainnya sehingga nasib Karang Taruna tidak lagi tergantung pada Kepala Desa. Selama ini, maju atau mundurnya Karang Taruna banyak bergantung pada komitmen Kepala Desa sehingga yang dominan adalah pendekatan politis. Revisi Permendes ditujukan agar pendekatan teknokratis dan partisipatif bisa terimplementasi di lapangan.

Untuk Kemensos: Kemensos sesuai Permensos No. 77 Tahun 2010 selaku yang bertanggung jawab atas pembinaan Karang Taruna harus memastikan bahwa program pembinaan menjangkau lebih banyak Karang Taruna terutama di pelosok, lebih berkelanjutan dan berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal. Pembinaan perlu lebih diintensifkan lagi agar revitalisasi Karang Taruna bisa diwujudkan.

Daftar Pustaka

DutaIslam.com, "Duh Siswa SDIT Pekanbaru Diajari Kibarkan Bendera HTI Sambil Nyanyi-Nyanyi" dalam www.dutaislam.com, Kamis 8 Februari 2018

Kompas.com, "Mendikbud Tak Sepakat Jika Pramuka Diwacanakan Dibawah Kemendikbud" dalam www.nasional.kompas.com 21 Agustus 2017

Kompas.com "Penguatan Pendidikan Karakter Tak Melulu Soal Akademis", dalam www.kompas.com, Sabtu 30 September 2017.

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Buku Pedoman Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar*, Jakarta: Kwarnas Pramuka

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Bahan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar*, Jakarta: Kwarnas Pramuka

Maftuch, Asep, 2008, *Buku Pegangan Pembina Pramuka*, Cimahi: Madrasah Tsanawiyah Darussalam

Saadah, 2017, *Panduan Pendidikan Kepramukaan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)*, Yogyakarta: PT Penerbit Samudera Biru

Matulef, Jeffrey, 2016, "Pokemon-Go Is Out Now in Australia and New Zealand", dalam *Eurogamer*, 8 Juli 2016.

Republika.co.id, "Tak Efektif Di Bawah Kemenpora, Pramuka Minta Pindah Ke kemendikbud" dalam www.republika.co.id, 24 Juli 2015

Rotorasiko, Taufan, 2012, *Jati Diri Karang Taruna Membangun Bangsa*, Jakarta: Penerbit Nusantara Media Baliwangi

Setara Institute, 2015, *Survei Toleransi Agama Siswa-Siswi SMA di Jakarta dan Bandung Raya*, Jakarta: Setara Institute

Setyawan, 2009, *Dari Gerakan Kepanduan ke Gerakan Pramuka*, Jakarta: Pustaka Tunasmedia

Sunardi, Andri Bob, 2001, *Boyman, Ragam Latih Pramuka*, Bandung: Penerbit Nuansa Muda

Tempo.com, "Dani Dwi Permana Menghilang Sejak Awal Juni" dalam www.metro.tempo.co, 8 Agustus 2009

Tim DAP, *Buku Pintar Pramuka, Sejarah Pramuka Indonesia*, Jakarta: Penerbit DAP

www.pramukanet.org

www.pramuka.or.id

Profil Penulis



Suratno (lahir 1977), adalah dosen dan chairman The Lead Institute, Universitas Paramadina Jakarta serta Wasekjend Lakpesdam PBNU. Suratno memperoleh gelar Doktor bidang Antropologi dari Institute fur Anthropologie, Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt, Jerman dengan menulis disertasi tentang “Antropologi Tobat; De-radikalisasi dan disengagement Muslim ekstrimis di Indonesia”.

Berikut beberapa riset dan program yang dilakukan Suratno dalam 3 tahun terakhir; (a) *Anthropology of Taubat: De-radicalization & Disengagement of -Moslem Extremist in Indonesia* (Disertation, 2016), (b) *ISIS and Radicalization of Moslem Youth in Indonesia* (Post-doctoral research, on-going since 2016), (c) *Deradicalization of Moslem Extremist in European Union Countries* (Sponsored by European Union, on-going since 2016), (d) *Anthropology of Taubat: How to make extremist Moslem denouncing his violence ideology and activism*, Sponsored by IFFSEC France, on-going since 2016), (e) *Love & Forgiveness in Post-Conflict Society, Lesson from Ternate North-Maluku* (Sponsored by John O. Fetzer Foundation USA, 2015), (f) *Love & Forgiveness in the Post-Conflict Societ, Lesson from Kalianda South-Lampung* (Sponsored by John O. Fetzer Foundation USA, 2016), (g) *Religious Sites and Social Harmony, Lesson from Balun Village Lamongan, Ganjuran Village Yogya and Vihara Avalokitesvara Sumenep*, Sponsored by PKUB, MoRA 2015), (h) *Religious Sites and Social Harmony, Lesson from Banuroja Village Gorontalo and Jaton Village North-Sulawesi*, Sponsored by PKUB MoRA 2016), (i) *Love and Forgiveness in the Post-Conflict Society, Lesson from Sampang Madura*, Sponsored by John O. Fetzer Foundation USA, on-going), (j) *Youth, Secure-Internet and Anti-*

Extremism, Sponsored by US Embassy, on-going, (k) *Youth, Interfaith Experience and Character Building*, Sponsored by US Embassy, on-going, (l) *Young Ulama, Interfaith Cooperation and Peace*, Sponsored by German Embassy, on-going, (m) *Revitalization of Pramuka & Karang Taruna to be agents of CVE (Countering Violent Extremism)*, Sponsored by PPIM UIN Jakarta & UNDP, on going, (n) *Infiltrasi Ideologi Ekstrimisme di Dunia Pendidikan di Indonesia*, sponsored by Kemitraan, on going.

Profil Lembaga



PIEC (*Paramadina Institute of Ethics and Civilization*) merupakan lembaga/organisasi dalam Universitas Paramadina. PI EC menjadikan prinsip-prinsip dan nilai ajaran Islam sebagai sumber utama panduan dan rujukan. Lembaga ini dibentuk untuk mengaktualisasikan visi dan misi Yayasan Wakaf Paramadina yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan bangsa yang adil, terbuka dan demokratis serta sebagai refleksi tanggungjawab sosialnya dalam memberikan pencerahan dan khidmat bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Tujuan pembentukan PI EC juga untuk memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan beradab. PIEC berupaya mewujudkan tujuan tersebut dalam program-program yang dilandasi oleh nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, kebebasan, martabat dan kehormatan manusia, dan solidaritas sosial dengan cara:

1. Memfasilitasi dan memberikan rangsangan bagi perubahan yang bermanfaat ke seluruh lapisan dan sektor masyarakat;
2. Menyediakan data dan informasi bagi upaya pemberdayaan masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan dalam proses pembangunan;

3. Mendorong interaksi dan keterkaitan antara moral/etika dengan kebijakan pembangunan dan antara norma dan teori dengan praktik dalam upaya memajukan kemakmuran dan kemajuan ekonomi serta mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan dalam berbagai aspeknya (politik, ekonomi dan kemasyarakatan);
4. Mempengaruhi strategi dan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada moral/etika dan peningkatan martabat manusia dan pemeliharaan lingkungan hidup;
5. Mempromosikan transformasi masyarakat dengan pendekatan yang holistik.
6. Mengusahakan keadilan dan perdamaian dunia dengan cara melakukan kerjasama dengan organisasi, institusi yang berlatar belakang agama dan tradisi yang berbeda atas dasar keprihatinan kemanusiaan dan kebaikan bersama.

Visi dan Misi PIEC

Mewujudkan masyarakat adil, makmur dan beradab diletakkan dalam perspektif moral dan etika sosial yang dilhami agama, dan menjadikan etika kemanusiaan untuk mengatasi berbagai problem dan tantangan global dewasa ini dan dalam membangun peradaban manusia. Tujuan ini direalisasikan dengan cara melakukan kajian pemikiran etika Islam, dialog dan kerjasama dengan berbagai lembaga yang mempunyai visi dan misi yang sama dari berbagai latar belakang agama, tradisi dan kelompok, menerbitkan hasil-hal kajian untuk dimanfaatkan bagi kebaikan bersama umat manusia.

Struktur Pengurus PIEC

Ketua : Pipip A Rifai Hasan, S.Ag, M.A, PhD
 Manajer Organisasi & Kerjasama : Aan Rukmana, S.Fil, M.A
 Manajer Program & Publikasi : Dr, Sunaryo, S.Fil, M.Hum

Peneliti:

1. Dr. Herdi Tri Nurwanto, S.S
2. Dr. phil, Suratno, M.A
3. Fuad Mahbub Siraj, S.Ag, M.Ag, Ph,D
4. Tia Rahmania, S.Psi, M, Psi
5. Zainul Maarif, Lc, M.Hum
3. Tri Wahyuti, S.kom, M.Si

Asisten Peneliti:

1. Lilis Hapsari, S.Fil
2. Ahmad Fadhil, S.fil
3. Adinda Firsta RP, S.Fil



Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta, JalanKertamukti No. 5, CiputatTimur, Tangerang Selatan,
Banten 15419 Indonesia

Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com
Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



*Empowered lives.
Resilient nations.*